2024

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

# LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LKjIP)

## Tahun anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
Jalan. Kol. Wahid Udin Lingk. I No. 240 Kel Serasan Jaya
Telp. 0714-321138 Sekayu (30711)

**KEPUTUSAN**
**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**
**NOMOR : 051 /KPTS/BPKAD/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM SATGAS PENYUSUNAN**
**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024**
**PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, perlu dilakukan Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

b. bahwa pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu dibentuk Tim Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang diatur dan dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
2. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi Sistem laporan kinerja instansi pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 09);

7. Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 270 Tahun 2021, tentang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Satgas Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Kepada Tim sebagaimana tersebut pada diktum pertama diatas mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menghimpun semua data baik yang bersifat Administrasi Umum maupun Operasional yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023.
b. Melakukan koordinasi, konsultasi kepada pihak-pihak terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023.
c. Melakukan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023.

d. Melakukan Evaluasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
e. Melakukan Perbaikan/Revisi Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai dengan perkembangan kinerja, tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
f. Melaporkan perkembangan Penyusunan/Evaluasi Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak Januari 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Sekayu
Pada tanggal : 2 Januari 2025

KEPALA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

H. ZABIDI, SE.,MM
Pembina Utama Muda
NIP 19650409 198503 1 004

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
Nomor : 051 /KPTS/BPKAD/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

Pembentukan Tim Satgas
Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024

| No. | Jabatan Dalam Tim | Keterangan |
|---|---|---|
| 1. | Penasehat | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin |
| 2. | Ketua | Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin |
| 3. | Sekretaris | JF. Perencana (Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan) |
| 4. | Koordinator | 1. Kepala Bidang Anggaran<br>2. Kepala Bidang Pengelolaan dan Aset Daerah<br>3. Kepala Bidang Perbendaharaan<br>4. Kepala Bidang Akuntansi |
| 5. | Anggota | 1. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran<br>2. Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban<br>3. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset<br>4. Kepala Sub Bidang Penatausahaan Pengeluaran Kas<br>5. Dodi Irawan, SE<br>6. Tanti Rohyati, A.Md<br>7. Solihan |

Sekayu, 2 Januari 2025

KEPALA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

H. ZABIDI, SE.,MM
Pembina Utama Muda
NIP 19650409 198503 1 004

# Daftar Isi


| | | | Halaman |
|---|---|---|---|
| Kata Pengantar | | ……..... | i |
| Daftar Isi | | .....……..... | v |
| BAB I | : | PENDAHULUAN…… | 1 |
| | | A. Latar Belakang …...…….……..... | 1 |
| | | B. Struktur Organisasi……...…..... | 2 |
| | | C. Isu Strategis..... | 7 |
| | | D. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKjIP..... | 8 |
| | | E. Sistematika Penyajian ...……..... | 9 |
| BAB II | : | PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA..……... | 11 |
| | | A. Rencana Strategis ..... | 11 |
| | | B. Indikator Kinerja Utama ..... | 18 |
| | | C. Rencana Kinerja …...……..... | 21 |
| | | D. Perjanjian Kinerja ..……..... | 21 |
| BAB III | : | AKUNTABILITAS KINERJA..……. | 22 |
| | | A. Kerangka Pengukuran Kinerja ..... | 23 |
| | | 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 ..... | 28 |
| | | 2. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir . | 44 |
| | | 3. Perbandingan Antara Capaian Realisasi Kinerja Tahun Lalu dengan Tahun ini dan Beberapa Tahun . | 45 |
| | | 4. Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Dalam Renstra BPKAD 2023-2026 ..... | 46 |
| | | 5. Analisis & Efisiensi Penggunaan Sumber Daya…… | 48 |

**6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Kinerja..... 51**

**B. Realisasi Anggaran ...……..……..... 52**

**BAB IV : PENUTUP…….. 53**

**LAMPIRAN**

- **Lampiran Rencana Strategik (RS)**
- **Lampiran Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2024**
- **Lampiran Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024**

# Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala semua Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan kinerja selama Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin disusun Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan LKjIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024. Komitmen dalam penyusunan LKjIP, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKjIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 terdiri atas Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhad ap indikator kinerja utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Akhirnya kami harapkan kritik dan saran membangun dari pembaca untuk menjadi *feed back* bagi peningkatan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun berikutnya, sekaligus mendorong percepatan terwujudnya *Good Governance.*

Sekayu, 2025

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN**
**DAN ASET DAERAH**
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**

**H. ZABIDI ,SE.,MM**
Pembina Utama Muda
NIP 19650409 198503 1 004

# Ikhtisar Eksekutif

Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah melalui penyusunan laporan kinerja (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mendorong percepatan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari organisasi Pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kinerjanya.

Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama yang telah dicanangkan pada tahun 2024 telah berhasil dicapai.

Evaluasi atas data-data pendukung atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Kedepan. *Pertama*, walaupun beberapa IKU telah mencapai target sangat baik, tidak ada dalam pencapaian kinerja beberapa indikator sepenuhnya sudah dijawab dengan baik. tantangan ini terlihat dalam kondisi terkait dengan pengesahan APBD yang tetap tepat waktu. Peran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin diperlukan untuk memastikan dan fasilitator berbagai inisiatif yang dilakukan untuk pencapaian indikator kinerja tersebut.

*Kedua,* hal ini juga bisa diartikan pentingnya koordinasi dan sinergi antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan instansi terkait. Tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan serta penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam perbaikan pencapaian kinerja dan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas

dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

**Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah**

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan Badan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang pengelola keuangan dan aset daerah sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, mempunyai tugas :

Membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan dibidang anggaran, perbendaharaan, pengelolaan aset daerah dan akuntansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

## B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan sebagai berikut :

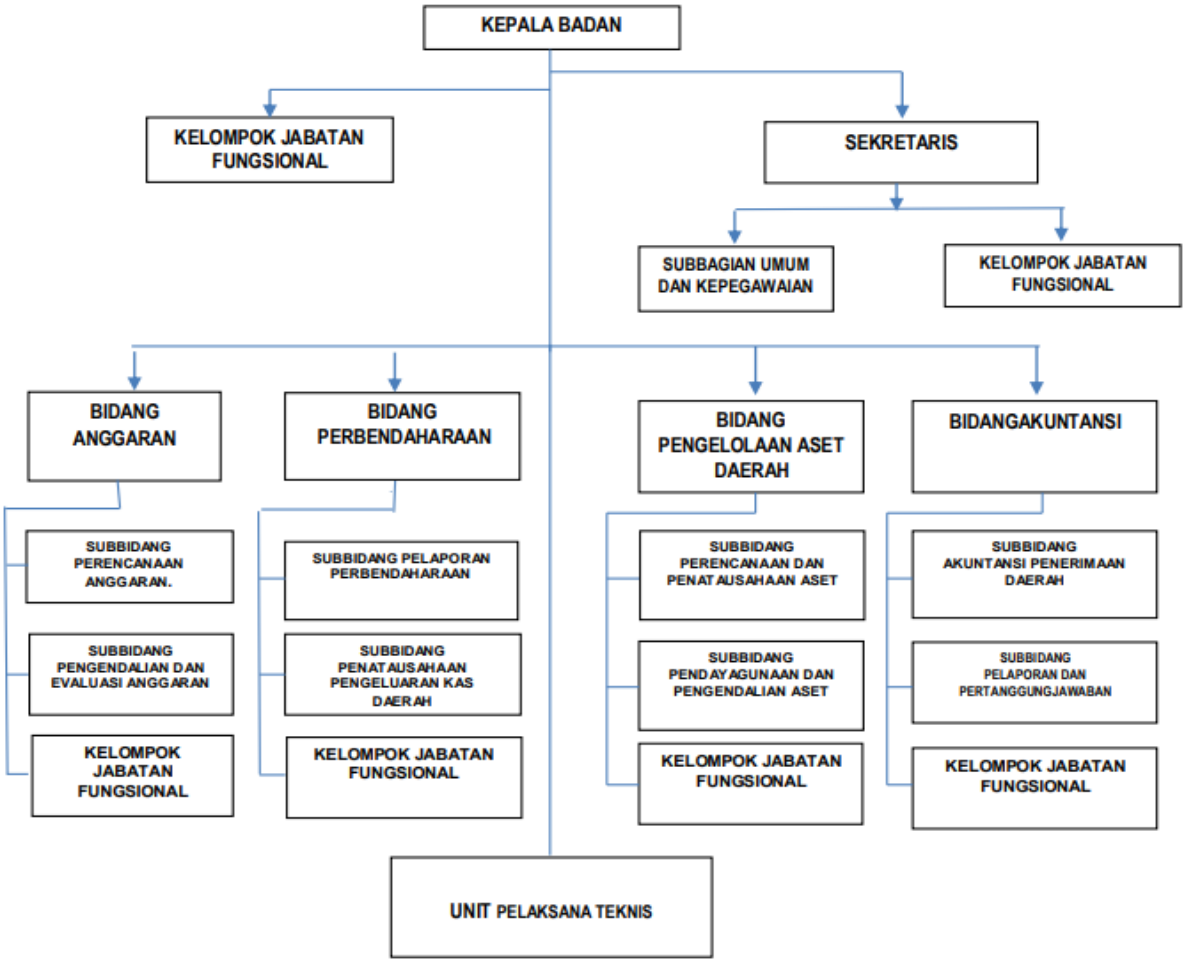


Penjabaran Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin terjadi perubahan sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 98 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut :

**a. Kepala Badan :**

**b. Sekretariat terdiri dari :**

1. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian;
2. Kelompok Jabatan Fungsional

**c. Bidang Anggaran, terdiri dari :**

1. Kasubbid. Perencana Anggaran;
2. Kasubbid. Pengendalian dan Evaluasi Anggaran;
3. Kelompok Jabatan Fungsional;

**d. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :**

1. Kasubbid. Pelaporan Perbendaharaan;
2. Kasubbid. Penatausahaan Pengeluaran Kas Daerah;
3. Kelompok Jabatan Fungsional;

**e. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri dari :**

1. Kasubbid. Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah;
2. Kasubbid. Pendayagunaan dan Pengendalian Aset;
3. Kelompok Jabatan Fungsional;

**f. Bidang Akuntansi, terdiri dari :**

1. Kasubbid. Akuntansi Penerimaan Daerah;
2. Kasubbid. Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
3. Kelompok Jabatan Fungsional;

**g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)**

Jumlah Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin dalam Tahun 2024 sebanyak 79 orang termasuk Unit Pelaksana Teknis Badan ( UPTB )

***a. Berdasarkan Unit Eselon***

Pegawai BPKAD Kab. Muba Tahun 2024 dapat dirinci dalam unit eselon sebagai berikut :

1. Kepala Badan : 1 orang (eselon II/b)
2. Sekretaris : 1 orang (eselon III/a)
3. Kepala Bidang : 4 orang (eselon III/b)
4. Kepala Sub Bagian : 1 orang (eselon IV/a)
5. Kepala Sub Bidang : 8 orang (eselon IV/a)
6. Kelompok Jabatan

   Fungsional : 5 Orang
7. Pelaksana : 49 Orang

***b. Berdasarkan Golongan***

Pegawai BPKAD Kab. Muba Tahun 2023 dapat dirinci berdasarkan golongan sebagai berikut :

1. CPNS : -
2. Golongan I : - orang
3. Golongan II : 7 orang
4. Golongan III : 55 orang
5. Golongan IV : 7 orang

### c. ***Berdasarkan Jenis Pendidikan***

Pegawai BPKAD Kab. Muba Tahun 2024 dapat dirinci berdasarkan jenis Pendidikan sebagai berikut :

1. SD : - orang
2. SLTP : - orang
3. SLTA : 4 orang
4. Sarjana Muda / DIII : 19 orang
5. Sarjana : 18 orang
6. Pasca Sarjana : 38 orang

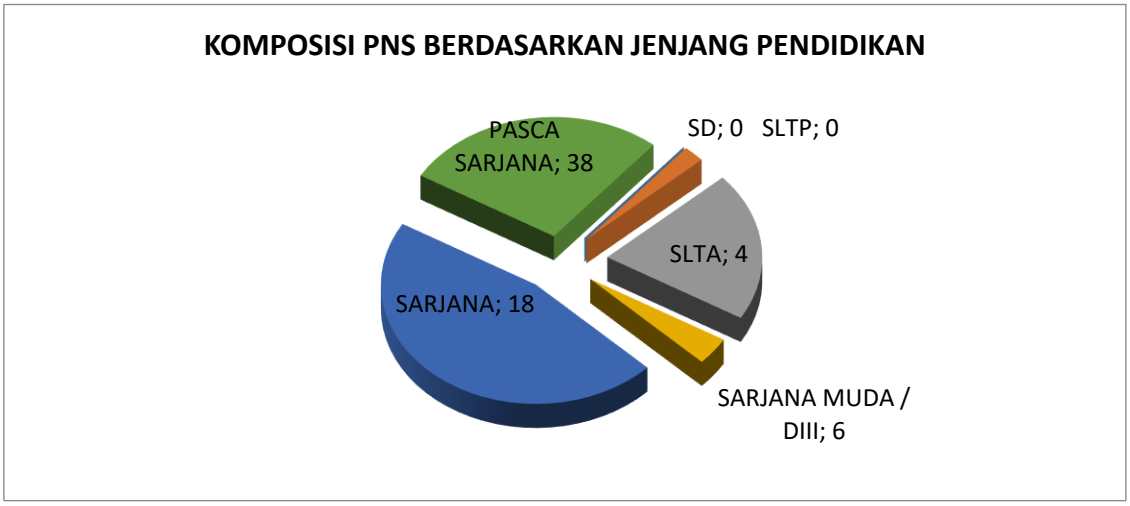


Gambar 1.2 komposisi PNS BPKAD Kab. Musi Banyuasin menurut jenjang pendidikan

### d. ***Berdasarkan Jenis Kelamin***

Pegawai BPKAD Kab. Muba Tahun 2024 dapat dirinci berdasarkan jenis Kelamin sebagai berikut :

1. Laki-Laki : 37 orang
2. Perempuan : 32 orang

## C. Isu Strategis

Dalam rangka mewujudkan sebuah kondisi di mana terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dalam roda pemerintahan di Kabupaten Musi Banyuasin , Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan beberapa isu-isu strategis dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan pembangunan dan perkembangan Kabupaten Musi Banyuasin, selama beberapa tahun sebelumnya dan berbagai permasalahan dan potensi Pengembangan, Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin di masa depan, serta menelaah dokumen-dokumen perencanaan antara lain Renstra kementrian/lembaga, Renstra Provinsi, RT/RW Kabupaten Musi Banyuasin dan KHLS sebagai berikut :

1. Penurunan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pengangguran;
2. Pertumbuhan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi termasuk Pengendalian Inflasi;
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
4. Penguatan Dukungan Infrastruktur untuk Perekonomian dan Pelayanan Dasar;
5. Pelestarian Lingkungan dan Penurunan Risiko Bencana;
6. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
7. Tuan Rumah PORPROV Sumsel XV dan PEPARPROV Sumsel V Tahun 2025.

Dengan mengangkat ke 7 (Tujuh) Isu Strategis di atas, di harapkan agar terbentuk Program-program dan berbagai Kegiatan yang dapat mendukung tercapainya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin, serta dapat menjadikan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang Baik, Bersih dan Akuntabel sehingga tercapai sebuah Opini yang baik terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin setiap tahunnya.

## D. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKjIP

Bertitik tolak dari Dokumen Rencana Strategis (Renstra-PD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi, Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah. yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala Badan kepada Bupati ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2024.

Laporan Kinerja (LKj) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada

setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

## E. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

**Bab I** : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas tentang A. Latar Belakang, B. Susunan Struktur Tugas dan Fungsi, C. Isu Strategis, D. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKjIP, E. Sistematika Penyajian.

**Bab II** : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan secara ringkas tentang A. Rencana Strategis dan Indikator Kinerja utama (IKU), B. Rencana Kinerja, C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

**Bab III** : Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang A. Pengukuran Capaian Kinerja, 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini, 2. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir, 3. Perbandingan Antara Capaian Realisasi Kinerja Tahun Lalu dengan Tahun Ini dan beberapa Tahun, 4. Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Target Dalam Perubahan Renstra BPKAD 2023-2026, 5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja, 6. Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, 7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan kinerja, B. Realisasi Anggaran.

**Bab IV** : Penutup, menjelaskan kesimpulan Kinerja Instansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset DaerahTahun 2024.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- Lampiran Rencana Strategik (RS)
- Lampiran Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2024
- Lampiran Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

# BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

## *A. Rencana Strategis*

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Bpkad Kab. Muba Nomor 084 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati Musi Banyuasin terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.

Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

**Tabel 2.1**

**Tujuan dan Sasaran Indikator Program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin**

| NO. | Tujuan | | Sasaran | | Indikator Tujuan/Sasaran | | Target Kinerja pada Tahun | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | 1.1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan aset daerah | 1.1.1 | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah | 1.1.1.1. | Persentase SKPD yang Penganggaranya menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | 1.1.1.2. | Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai dengan SAP | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | 1.1.1.3 | Persentase Pencairan dana on skedul | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | 1.1.2 | Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah | 1.1.2.1 | Persentase Data aset yang akurat | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 2.1 | Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Bidang Urusan Keuangan | 2.1.1 | Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Bidang Urusan Keuangan | 2.1.1.1. | Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | 2.1.2.1 | Persentase Pemenuhan layanan Keuangan dan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | 2.1.2.2 | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | 2.1.2.3 | Persentase Laporan capaian Kinerja dan Laporan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan Akuntabel | 100% | 100% | 100% | 100% |

Pada prinsipnya tujuan dan sasaran merupakan target atau hasil yang diharapkan. Yang pada akhirnya tujuan dan sasaran tersebut akan melahirkan program dan kegiatan yang membantu dalam mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang andal dan dapat dipercaya menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Govermance).

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagai pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah maka pada periode 2023-2026, untuk mendukung Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan 2 (dua) Program Tugas dan Fungsinya dan 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintahan penjabaran sebagai berikut :

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Tujuan** | : | **Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan aset daerah.** |
| **1.1** | **Sasaran** | : | **Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.** |
| 1.1.1 | Indikator | : | Persentase SKPD yang Penganggarannnya Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) |
| 1.1.2 | Indikator | : | Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) |
| 1.1.3 | Indikator | : | Persentase Pencairan Dana On Schedul |
| **1.2** | **Sasaran** | : | **Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah.** |
| | | | Persentase Data Aset yang Akurat |
| 1.2.1 | Indikator | : | |
| **2.** | **Tujuan** | : | **Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Bidang Urusan Keuangan.** |
| **2.1** | **Sasaran** | : | **Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Bidang Urusan Keuangan.** |
| 2.1.1 | Indikator | : | Persentase pemenuhan layanan Keuangan dan administrasi perkantoran. |
| 2.1.2 | Indikator | : | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik . |
| 2.1.3 | Indikator | : | Persentase Pengelolaan kepegawaian yang dilaksankan tepat waktu. |
| 2.1.4 | Indikator | : | Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksankan tepat waktu dan Akuntabel. |

Indikator sasaran diatas didukung oleh **Program, Kegiatan, Sub Kegiatan** dan **Indikator sub kegiatan** sebagai berikut :

## I. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

**Sasaran Program : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.**

**Indikator Program :**

1. **Persentase SKPD yang Penganggarannya menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)**
2. **Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai SAP.**
3. **Persentase Pencairan Dana On Schedul**

***Kegiatan***

**1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah.**

| | | |
|---|---|---|
| Indikator Kegiatan | : | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah |
| Hasil Kegiatan | : | Tersedianya Dokumen Penganggaran yang sesuai dengan ketentuan. |

**2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah.**

| | | |
|---|---|---|
| Indikator Kegiatan | : | Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah. |
| Hasil Kegiatan | : | Meningkatnya Pelayanan Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah. |

**3. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.**

| | | |
|---|---|---|
| Indikator Kegiatan | : | Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah. |
| Hasil Kegiatan | : | Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah |

**4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.**

| | | |
|---|---|---|
| Indikator Kegiatan | : | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah. |
| Indikator Hasil | : | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah sesuai ketentuan. |

**5. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah.**

| | | |
|---|---|---|
| Indikator Kegiatan | : | Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implemetasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Lingkup Keuangan Daerah |
| Indikator Hasil | : | Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implemetasi Sistem Impormasi Pemerintahan Daerah Lingkup Keuangan Daerah. |

## PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

**Sasaran Program : Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah.**

**Indikator Program :**

**1. Persentase Data Aset Yang Akurat**

### ***Kegiatan***

**1. Pengelolaan Barang Milik Daerah.**

| | | |
|---|---|---|
| Indikator Kegiatan | : | Meningkatnya Tertib Administrasi dan Optmalisasi Pengelolaan BMD. |
| Indikator Hasil | : | Persentase Pengelolaan BMD sesuai ketentuan. |

# II. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

**Sasaran Program** : Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Bidang Urusan Keuangan**.**

**Indikator Program :**

1. **Persentase pemenuhan layanan Keuangan dan administrasi perkantoran.**
2. **Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik. Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik.**
3. **Persentase Pengelolaan kepegawaian yang dilaksankan tepat waktu.**
4. **Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksankan tepat waktu dan Akuntabel.**

## ***Kegiatan***

**1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**

Indikator Kegiatan : Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah.

Indikator Hasil : Tersedia Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

**2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.**

Indikator Kegiatan : Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Indikator Hasil : Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

**3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.**

Indikator Kegiatan : Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

Indikator Hasil : Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

**4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.**

Indikator Kegiatan : Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Indikator Hasil : Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

**5. Administrasi Umum Perangkat Daerah.**

Indikator Kegiatan : Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah.

Indikator Hasil : Terpenuhinya Administrasi umum Perangkat Daerah.

**6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.**

Indikator Kegiatan : Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Hasil : Jumlah Kendaraan Selesai Pengadaan/ siap digunakan.

**7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

Indikator Kegiatan : Terlaksananya Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah.

Indikator Hasil : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah.

**8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

Indikator Kegiatan : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Hasil : Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Perangkat Daerah.

## B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka ditetapkanlah Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin melalui Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 085/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 16 Februari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, sebagai berikut

| NO. | SASARAN RENSTRA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | |
|---|---|---|---|
| 1. | MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 1. | Persentase SKPD yang Penganggarannya menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) |
| | | 2. | Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai SAP |
| | | 3. | Persentase Pencairan Dana On Schedule |
| 2. | MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN ASET DAERAH | 1. | Persentase Data Aset Yang Akurat |

Berikut ini Penjelasan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah yang diuraikan pada table berikut :

**Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | ALASAN | FORMULASI/CARA PENGUKURAN | SUMBER DATA | KETERANGAN/KRITERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah | Persentase SKPD yang Penganggarannya menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) | % | Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah RKA-SKPD yang sesuai ABK : Jumlah RKA seluruh SKPD x 100% | | RKA yang sesuai ketentuan dapat mempercepat proses penyusunan Raperda APBD. Adapun RKA yang sesuai dengan ketentuan adalah sbb : -RKA yang disusun sesuai dengan SE Pedoman Penyusunan RKA -Sinkronasi antara program dan kegiatan dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan - Memperhatikan prinsip - prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, transparasi dan akuntabilitas. - RKA disusun sesuai dengan KUA, |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | PPAS, Kode Rekening dan Standar Biaya |
| | | Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai dengan SAP | % | Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP | Jumlah Laporan Keuangan OPD Sesuai SAP : Jumlah Total OPD x 100% | | SAP adalah Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam menyusun danmenyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah antara lain : -Relevan -Dapat dibandingkan dan -Dapat dipahami |
| | | Persentase Pencairan dana on skedul | % | Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah Dokumen SP2D yang On Skedul : Total SP2D yang diterbitkan x 100% | | Waktu penyelesaian SP2D dimulai setelah dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan, lama waktu penyelesaian SP2D 2 hari kerja sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 2 | Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah | Persentase Data aset yang akurat | % | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah | Nilai Aset yang tercatat secara Akurat : Nilai Aset keseluruhan x 100% | | -Nilai Aset adalah Nilai perolehan seluruh biaya yang dikeluarkanuntuk memperoleh aset tetap tersebut mulai dari biaya pembelianhingga semua biaya yang timbul hingga aset tetap tersebut siapdigunakan atau dioperasikan. -Akurat adalah setiap informasi yang benar berdasarkan bukti bukti dan fakta yang memadai , serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. -Akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. |
| 3 | Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Bidang Urusan Keuangan | Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu | % | | Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Bidang Urusan Keuangan : Total Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Bidang Urusan Keuangan x 100% | | |
| | | Persentase Pemenuhan layanan Keuangan dan Administrasi Perkantoran | % | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik | % | | | | |
| | | Persentase Laporan capaian Kinerja dan Laporan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan Akuntabel | % | | | | |

## C. Rencana Kinerja

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2026, disusun suatu Rencana Kerja (*Perfomance Plan*) setiap Tahunnya. Rencana Kerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan

## D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024 adalah

sebagai berikut:

| Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Target |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah | 1. Persentase SKPD yang Penganggarannya menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) | % | 100 % |
| | 2. Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai SAP | % | 100 % |
| | 3. Persentase Pencairan Dana On Schedule | % | 100 % |
| 2. Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah yang akuntabel | 1. Persentase Data Aset Yang Akurat | % | 100 % |

# BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2023-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

## A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

| Persentase | Predikat | Kode Warna |
|---|---|---|
| < 100% | Tidak Tercapai | |
| = 100% | Tercapai/ Sesuai Target | |
| > 100% | Melebihi Target | |

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024**

| No | Kategori/Interpretasi | Rata-Rata % Capaian | Kode Warna |
|---|---|---|---|
| 1 | Sangat Baik | > 90 | |
| 2 | Baik | 75.00 – 89.99 | |
| 3 | Cukup | 65.00 – 74.99 | |
| 4 | Kurang | 50.00 – 64.99 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | Sangat Kurang | 0 – 49.99 | |

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2023-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditet

apkan. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2024, Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 085/KPTS/BPKAD/2022 telah ditetapkan sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja.

**Metodelogi Pengukuran Pencapaian Kinerja**

**a. Metode Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut:

1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{kinerja Rencana}} \times 100\ \%$$

Selain membandingkan rencana dengan realisasi, analisa pengukuran capain kinerja juga dilakukan dengan cara :

1. Membandingkan antara target dan realisasi Tahun 2024.
2. Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 -2026
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
6. Analisis atas program/kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan atas pencapaian pernyataan kinerja.
7. Realisasi Anggaran

**b. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung hubungan antara sasaran dengan indikator kinerja pengukur keberhasilan sasaran yang telah direncanakan.

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- ☞ **X ≥ 85 % : Baik sekali**
- ☞ **70 % ≤ X < 85 % : Baik**
- ☞ **55 % < X < 70 % : Cukup**
- ☞ **X ≤ 55% : Kurang**

**Indikator Kinerja**

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), dan hasil (*outcomes*).

**Indikator Sasaran**

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan Target Kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.

Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

## A. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan darui Sasaran Strategis Organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja, maka dalam LKjIP BPKAD Kabupaten Musi Banyusin akan dijelaskan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam Perubahan Renstra BPKAD Tahun 2023-2026.

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realiasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase OPD Yang Penganggaranya Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai SAP | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Persentase Pencairan Dana On Scehedule | % | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Persentase Data Aset Yang Akurat | % | 100 | 100 | 100 |

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam Renstra BPKAD sebanyak 4 Indikator dari ke 4 Indikator tersebut dapat terealiasasi 100 % dan telah memenuhi kreteria baik sekali.

Rincian analisis capaian masing-masing tujuan dan sasaran sasaran kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tujuan : Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan daerah**

Untuk mewujudkan tujuan diatas telah ditetapkan 2 (Dua) Sasaran Strategis, dengan 4 (Empat) indikator yang telah dilaksanakan dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini :

***1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.***

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah ada 4 indikator kinerja sasaran didukung oleh program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang menunjang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah | 1. Persentase SKPD yang penganggarannya menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) | Persentase | 100 | 100 | 100 |
| | 2. Laporan Keuangan OPD Sesuai SAP | Persentase | 100 | 100 | 100 |
| | 3. Pencairan Dana On Schedule | Persentase | 100 | 100 | 100 |
| Meningkatnya kualitas pengelolaan aset yang akuntabel | 1. Persentase Data Aset Yang Akurat | Persentase | 100 | 100 | 100 |

1. *Indikator kinerja Persentase OPD Yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)* dengan capaiannya adalah sebagai berikut :

| Indikator Kinerja | | Capaian | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2024 | | | |
| | | Satuan | Target | Realisasi | Capaian % |
| 1 | Persentase SKPD yang penganggarannya menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) | Persentase | 100 % | 100 % | 100 % |

$$\frac{Jumlah\ RKA-SKPD\ yang\ sesuai\ ketentuan}{Jumlah\ RKA\ Seluruh\ SKPD}\ x\ 100\ \%$$

$$\frac{48\ \ RKA-SKPD\ yang\ sesuai\ ketentuan}{48\ \ RKA\ Seluruh\ SKPD}\ x\ 100\ \%$$

Berdasarkan tabel di atas Indikator kinerja Persentase SKPD yang menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja dari target 100% dan realisasi 100% sehingga memperoleh capaian 100%. Penganggaran dengan pendekatan kinerja berfokus pada efisiensi penyelenggaraan suatu aktifitas. Efisiensi yaitu sejauh mana perbandingan tingkat keluaran suatu kegiatan dengan masukan yang digunakan. Anggaran tidak hanya didasarkan pada apa yang dibelanjakan saja, tetapi juga didasarkan pada rencana tertentu yang pelaksanaanya disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan penggunaan biaya tersebut harus efisien dan efektif. Tolak ukur keberhasilan anggaran terletak pada prestasi hasil anggaran dengan menggunakan dana secara efisien. Dengan membuat suatu sistem penganggaran dan memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan.

Penganggaran berbasis kinerja dalam penyusunan RKA-SKPD dalam Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 48 SKPD telah memenuhi prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja walaupun pada triwulan I sampai dengan triwulan III masih terdapat beberapa SKPD yang melakukan kesalahan dalam penganggaran atau kesalahan dalam penempatan kode rekening belanja, hal ini terlihat dengan masih adanya usulan revisi/pergeseran anggaran kegiatan dari SKPD. Untuk capaian

persentase SKPD yang menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) sudah dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV sesuai dengan target yaitu 100%

Adapun prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja yang diterapkan SKPD dalam hal penganggaran sebagai dasar pengukuran penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) SKPD dalam Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut:

- Transparansi dan akuntabilitas anggaran

Anggaran OPD pada suatu kegiatan telah menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil dan juga manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dari suatu program/kegiatan yang dianggarkan. Hal ini tergambar pada indikator dan tolok ukur kinerja telah sesuai dengan belanja yang dianggarkan pada RKA-OPD.

- Disiplin anggaran :

Belanja yang dianggarkan pada setiap rekening belanja OPD merupakan batasan tertinggi atau sudah sesuai dengan Standar Biaya dan output yang ditetapkan. Adapun apabila masih terdapat anggaran yang tidak sesuai atau masih terdapat kesalahan dalam penempatan kode rekening belanja dilakukan pergeseran anggaran dalam tahun berjalan. Dalam hal ini tergambar pada tabel realisasi IKU per triwulan yaitu persentase OPD yang penganggarannya menerapkan ABK mulai dari triwulan I sampai dengan triwulan IV yaitu 100%.

- Keadilan anggaran :

Dalam hal pengalokasian anggaran OPD, penggunaan anggarannya dialokasikan dengan adil agar dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan. Dalam penetapan dan pembagian pagu anggaran tentunya memperhatikan anggaran untuk pelayanan dasar seperti anggaran kesehatan, pendidikan dan perumahan.

- Efektifitas dan efisiensi anggaran :

Penyusunan anggaran OPD dilakukan dengan azas efisiensi, tepat waktu dan tepat guna serta dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang telah disediakan harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang optimal untuk kepentingan stakeholders.

- Disusun dengan pendekatan kinerja :

Penyusunan anggaran dengan pendekatan kinerja mengutamakan pada pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang telah ditetapkan. Pencapaian hasil kerja tersebut harus sama atau lebih besar daripada biaya yang telah ditetapkan sebelumnya.

Anggaran berbasis kinerja pada OPD di Kabupaten Musi Banyuasin telah diterapkan pada awal tahun anggaran berjalan (N) karena pada saat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) atau (N-1) sebelum diterbitkan DPA dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa dalam penyusunan RKA-SKPD, bahwa TAPD harus menyiapkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, TAPD melalui Bidang Anggaran telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : **:** B-903/221/SE/BPKAD/2023 tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD Tahun Anggaran 2024, sebagai acuan kepada SKPD dalam menyusun RKA-SKPD yang mencakup:

1. Prioritas Pembangunan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terkait.
2. Alokasi Plafond Anggaran Sementara untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD berikut rencana pendapatan dan penerimaan pembiayan.
3. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD.
4. Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, Kode Rekening APBD, Format RKA-SKPD Analisis Standar Belanja (ASB), RKBMD dan Kebijakan Penyusunan APBD.

Capaian indikator penganggaran berbasis kinerja didukung oleh Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kegiatan Koordinasi dan

Penyusunan Rencana Anggaran Daerah serta disukung oleh Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS, Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD, Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD, Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD, Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran. Untuk capaian persentase OPD yang menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) sudah dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV sesuai dengan target yaitu 100%.

❖ Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Faktor pendukung keberhasilan OPD yang menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja adalah :

1. Tersedianya SDM yang handal dan berkompeten terutama pada bagian perencanaan
2. Adanya komitmen OPD untuk mentaati seluruh pedoman yang telah ditetapkan dalam penyusunan anggaran
3. Adanya analisis yang mendalam yang mengarah pada target yang hendak dicapai pada saat penyusunan anggaran
4. Komunikasi dan koordinasi yang intens di internal OPD

Faktor penyebab kegagalan/penurunan kinerja OPD dalam penerapan Anggaran Berbasis Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan OPD yang kurang optimal
2. Minimnya SDM yang handal dan berkompeten dalam perencanaan dan penganggaran
3. Keterbatasan waktu dalam melakukan verifikasi anggaran.

❖ Solusi

Adanya sosialisasi tentang kebijakan dan regulasi pada bidang anggaran kepada seluruh OPD berdasarkan Surat Kepala BPKAD Nomor : B-005/67/BPKAD/2023 dan pelaksanaan asistensi dan verifikasi RKA & Rancangan DPA TA. 2024 berdasarkan Surat Kepala BPKAD Nomor : B-

005/61/BPKAD/2023. Pelaksanaan asistensi dan verifikasi sendiri ditujukan agar dalam penyusunan anggaran OPD menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja. Selain pelaksanaan pembahasan penyusunan RKA dan Rancangan DPA TA. 2024, Tim Teknis juga melakukan pendampingan dalam pengimplementasian aplikasi SIPD-RI.

- Perbandingan Peningkatan/Penurunan kinerja 5 Tahun terakhir serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Perbandingan Peningkatan/Penurunan Kinerja dalam 5 Tahun terakhir Persentase OPD yang menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja adalah konstan dengan capaian 100%. Solusi yang telah dilakukan yaitu pada tahap penyusunan rencana, guna memastikan ketersediaan data dan informasi valid, maka perlu dilakukan kajian terkait kegiatan yang hendak dilaksanakan agar bisa dihasilkan dokumen perencanaan yang baik dan akurat. Pada tahap penganggaran perlu adanya pedoman sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK).

- Analisis program, kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berdasarkan pernyataan kinerja tahun 2024 Bidang Anggaran untuk melaksanakan 1 Program yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah, 1 Kegiatan yaitu Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dan 9 Sub Kegiatan yang akan mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan yaitu Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah. Adapun Sub Kegiatan yang dimaksud sebagai berikut :

1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
5. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
6. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
7. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
8. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

9. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

❖ Bukti Dukung (Evidence) dari Capaian Indikator masing-masing

Pelaksanaan rapat-rapat pembahasan anggaran, sosialisasi dan kegiatan asistensi dan verifikasi RKA dan DPA serta dokumen perencanaan anggaran yang disusun tepat waktu, akurat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti : KUA-PPAS, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Standar Biaya, RKA dan DPA (eviden terlampir)

*2. Indikator Kinerja Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai SAP*

dengan capaiannya adalah sebagai berikut :

| Indikator Kinerja | | Capaian | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2024 | | | |
| | | Satuan | Target | Realisasi | Capaian % |
| 2 | Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai SAP | Persentase | 100 % | 100 % | 100 % |

Capaian Indikator Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai SAP dari target 100 % dengan capaiannya 100%. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan entitas pelaporan, dan oleh karenanya menurut peraturan perundang-undangan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan entitas akuntansi, dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, susunan perangkat daerah Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari:

a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat DPRD;
c. Inspektorat Daerah;
d. Satuan Polisi Pamong Praja;
e. 22 dinas daerah;
f. 6 badan daerah; dan

g. 15 kecamatan.

Laporan Keuangan OPD yang disusun Tahun 2024 terdiri dari:

a. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD pada Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari:
   a. Laporan Realisasi Anggaran;
   b. Neraca;
   c. Laporan Operasional;
   d. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
   e. Catatan atas Laporan Keuangan

b. Laporan Realisasi APBD Bulanan Tahun Anggaran 2024.

Capaian Indikator Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai SAP dari target 100 % dengan capaiannya 100% baik untuk Laporan Keuangan TA. 2023 maunpun Laporan Realisasi APBD Bulanan TA. 2024. Dari total 47 OPD semuanya sudah menyajikan Laporan Keuangan OPD sesuai SAP. Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2023 dan Laporan Realisasi APBD TA. 2024 tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 244 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi.

❖ Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan menyajikan Laporan Keuangan OPD sesuai SAP. Dalam upaya Pertanggungjawaban Keuangan Perangkat Daerah TA. 2023 telah disampaikan

a. Surat Edaran Bupati Nomor: 258 Tahun 2023 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Langkah-Langkah Strategis Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2023 dengan ringkasan jadwal sebagai berikut:
   1. Penyampaian, verifikasi dan pendampingan penyusunan kertas kerja Laporan Keuangan Perangkat Daerah tanggal 22 Desember 2023 s.d 8 Januari 2024
   2. Rekonsiliasi, Entry Jurnal dan Konsolidasi Data Transaksi Keuangan Non RKUD tanggal 22 Desember 2023 s.d 8 Januari 2024.
   3. Rekonsiliasi, Entry Jurnal dan Konsolidasi Data melalui Aplikasi SIMDA FMIS tanggal 5 Januari 2024 s.d 19 Januari 2024.

4. Reviu Laporan keuangan Pemkab. Muba oleh Inspektorat tanggal 26 Januari 2024 s.d 9 Februari 2024.
5. Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi banyuasin Unaudited ke BPK-RI tanggal 15 Februari 2024.

b. Surat Edaran Bupati Nomor: 457 Tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2024 dan 2025.

❖ Resiko kegagalan yaitu

1. Untuk penyusun Laporan Keuangan TA. 2023 mengggunakan Aplikasi FMIS yang pertama kalinya digunakan sebagai sarana penyajian Laporan Keuangan OPD di Tahun Anggaran 2023.
2. Untuk penyusun Laporan Realisasi APBD Bulanan TA. 2024 mengggunakan Aplikasi SIPD-RI yang pertama kalinya digunakan sebagai sarana penyajian Laporan Realisasi APBD Bulanan TA. 2024.

❖ Solusi

a. Untuk penyusun Laporan Keuangan TA. 2023 mengggunakan Aplikasi FMIS dilaksanakan kegiatan Workshop Implementasi Aplikasi Financial Management Information System (FMIS) dalam rangka Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2023 di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan reviu Laporan Keuangan oleh Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin.
b. Untuk penyusun Laporan Realisasi APBD Bulanan TA. 2024 mengggunakan Aplikasi SIPD-RI dilaksanakan Bimbingan Teknis Implementasi Aplikasi SIPD-RI Bersama Tim Teknis Kemendagri dan OPD Kab. Musi Banyuasin.

❖ Perbandingan Peningkatan/Penurunan kinerja 5 Tahun terakhir serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Dalam 5 Tahun terakhir, kinerja Persentase laporan keuangan OPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah konstan dengan capaian 100%. Solusi yang telah dilakukan yakni

1) Merevisi Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi sebagai pedoman penyusunan Laporan Keuangan OPD mengikuti dinamika

perkembangan regulasi mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan dengan rincian sebagai berikut:

a. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 244 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
b. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 53 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 244 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi;
c. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 244 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

2) Meyampaikan Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin tentang Langkah-Langkah Strategis Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan rincian sebagai berikut:

a. Surat Edaran Bupati Nomor: B-900/378/BPKAD-IV/2020 tanggal 18 September 2020 tentang Langkah-Langkah Strategis Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2020 dan Surat Edaran Bupati Nomor:B-900/105/BPKAD-IV/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.
b. Surat Edaran Bupati Nomor: B-900/400/BPKAD-IV/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Langkah-Langkah Strategis Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 dan Surat Edaran Bupati Nomor:B-900/210/BPKAD-IV/2022 tanggal 26 April 2022 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2022.
c. Surat Edaran Bupati Nomor: B-900/464/BPKAD-IV/2022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Langkah-Langkah Strategis Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2022 dan Surat Edaran Bupati Nomor:B-900/136/BPKAD-IV/2023 tanggal 16 Mei 2023 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2023.

d. Surat Edaran Bupati Nomor: 285 Tahun 2023 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Langkah-Langkah Strategis Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2023 dan Surat Edaran Bupati Nomor: 457 Tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2024 dan 2025.

   Surat Edaran Bupati Nomor: 458 Tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang Langkah-Langkah Strategis Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2024 dan Surat Edaran Bupati Nomor: 457 Tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2024 dan 2025.

❖ Bukti Dukung (Evidence) dari Capaian Indikator masing-masing

a. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran untuk Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
b. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor (BPK-RI) Nomor 36.A/LHP/XVIII.PLG/04/2024 tanggal 24 April 2024 menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragrap dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

3. Indikator Kinerja Persentase Pencairan Dana On Schedule dengan capaiannya adalah sebagai berikut :

| Indikator Kinerja | | Capaian | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2024 | | | |
| | | Satuan | Target | Realisasi | Capaian % |
| 3 | Persentase Pencairan Dana On Schedule | Persentase | 100 % | 100 % | 100 % |

$$\frac{\textit{Jumlah Dokumen SP2D yang On Schedule}}{\textit{Total SP2D yang diterbitkan}} x\ 100\ \%$$

$$\frac{\mathbf{14328}}{\mathbf{14328}} x\ 100\ \%$$

Dari uraian tabel diatas bahwa Capaian indikator Persentase Pencairan Dana On Schedule tahun 2024 mencapai 100% dari target 100%. Pencairan Dana On Schedule yang dimaksud artinya pelayanan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari 48 OPD sebanyak 14328 Surat Perintah Membayar (SPM) dibagi dengan total SP2D yang diterbitkan sebanyak 14328 SP2D di kali 100 % maka didapat hasil 100% realisasi dan 100% capaian.

❖ Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan dalam Proses penyerapan atau pencairan dana / anggaran dapat tercapai On Schedule pada Tahun Anggaran 2024 dapat terealisasi menacapai 100 % sesuai dengan target yang ditetapakan disebabkan anatara lain :

1. Adanya penegasan Kepala Daerah dengan membuat Surat Edaran Nomor B-900/1389/BPKAD-III/2024 Tanggal 11 Nopember 2024 Tentang Batas Waktu Penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2024
2. Dukungan SDM pada setiap Perangkat Daerah dalam menggunakan Aplikasi Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggung jawaban.
3. Proses perencanaan dan penganggaran yang sudah lebih baik pada setiap Perangkat Daerah.

4. Melakukan Pembinaan kepada Bendahara SKPD melalui Konsultasi baik secara langsung atau melalui WA Group Bendahara yang telah dibuat untuk Resiko kegagalan yaitu jika Perangkat Daerah tidak cermat dalam input Rencana Anggaran Kas (RAK) dan input Surat Penyedian Dana (SPD).

❖ Solusi

Dilaksanakan pendampingan dan rekonsiliasi kepada 48 SKPD untuk meminimalisir adanya ketidak cermatan pada penginputan Rencana Anggaran Kas (RAK) dan input Surat Penyedian Dana (SPD).

❖ Perbandingan Peningkatan/Penurunan kinerja 5 Tahun terakhir serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Dalam 5 Tahun terakhir, kinerja Persentase pencairan dana on schedule adalah konstan dengan capaian 100%. Solusi yang telah dilakukan yakni melakukan pembinaan secara berkala dan menerbitkan Peraturan Kepala Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 260 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pedoman pengelolaan keuangan daerah.

❖ Bukti Dukung (Evidence) dari Capaian Indikator masing-masing

1. Surat Edaran Nomor B-900/1389/BPKAD-III/2024 Tanggal 11 Nopember 2024 Tentang Batas Waktu Penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2024.
2. Register SP2D by SIPD
3. Dokumentasi saat pemberian pembinaan kepada Pejabat Pengelola Keuangan SKPD
4. Screenshoot Group WA Bendahara SKPD

**Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah yang akuntabel sebagai berikut :**

1. Indikator Kinerja Persentase Data Aset Yang Akurat dengan capaiannya adalah sebagai berikut :

| Indikator Kinerja | | Capaian | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2024 | | | |
| | | Satuan | Target | Realisasi | Capaian % |
| 1 | Persentase Data Aset Yang Akurat | Persentase | 100 % | 100 % | 100 % |

$$\frac{Nilai\ Aset\ yang\ tercatat\ secara\ Akurat}{Nilai\ Aset\ Keseluruhan}\ x\ 100\ \%$$

Laporan Barang Milik Daerah disusun berdasarkan data aset yang akurat menyajikan setiap informasi yang benar berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang memadai, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kualitas Pengelolaan Aset Daerah yang akuntabel berdasarkan kepada persentase data aset yang akurat merupakan nilai perolehan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut mulai dari biaya pembelian hingga semua biaya yang timbul hingga aset tersebut siap digunakan atau dioperasikan.

Capaian Indikator Kinerja Persentase Data Aset yang Akurat dari target 100% dan Realisasi 100% sehingga memperoleh Capaian 100% diukur berdasarkan dari Nilai Aset yang tercatat secara akurat pada Laporan Barang Milik Daerah dari 47 SKPD, 30 Puskesmas, 3 RSUD, 447 SD dan 109 SMP disajikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Laporan Barang Milik Daerah disajikan pada Neraca Aset per 31 Desember 2024 yang telah melakukan penginputan, verifikasi dan *approved* pada Aplikasi e-BMD pada saat ini dengan Total Aset Tetap sebesar Rp. 14.992.852.963.690,60,- terdiri dari Tanah sebesar Rp. 629.585.124.749,93,- Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 1.463.162.319.363,82,- Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 3.214.975.932.539,34,- Jalan, Irigansi dan Jaringan sebesar Rp. 9.452.240.374.807,24,- Aset tetap Lainnya sebesar Rp. 153.216.005.603,25,- Konstruksi Dalam Pengerjaan sebear Rp. 79.673.206.627,05,- dan Total Aset Lainnya sebesar Rp. 321.414.188.390,47,-

terdiri dari Kemitraan Dengan Pihak Ketiga sebesar Rp. 178.144.668.236,27,- Aset Tidak Berwujud sebesar Rp. 74.528.197.140,46,- Aset Lain-lain sebesar Rp. 68.741.323.013,74,-.

- Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/Penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan dalam menyusun Laporan Barang Milik Daerah yang akurat telah dilakukan upaya melalui :

1) Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor 458 Tahun 2024 Tanggal 31 Oktober 2024 tentang Langkah-langkah Strategis Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2024.
2) Sosialisasi kepada seluruh Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sekaligus Penandatanganan Pakta Integritas Pengggunaan Fasilitas Kantor.

- Solusi

1. Melakukan *Couching Clinic* terhadap seluruh Pengurus Barang dana Operator Aplikasi BMD dalam penggunaan Aplikasi Barang Milik Daerah (e-BMD) seluruh SKPD.
2. Melakukan komunikasi dan koordinasi intensif terhadap VIC Aplikasi e-BMD dan seluruh SKPD serta UPB nya masing-masing.

- Perbandingan Peningkatan/Penurunan kinerja 5 Tahun terakhir serta alternativ solusi yaang telah dilakukan.

Dalam 5 Tahun terakhir, kinerja persentase Data Aset yang Akurat terhadap Laporan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai ketentuan pada Tahun 2021 sebesar 99,96 %, Tahun 2022 sebesar 99,20 % dan Tahun 2023 100% adalah mengalami peningkatan setiap tahun dengan capaian pada Tahun 2023 mencapai 100%. Alternativ solusi yang telah dilakukan yaitu merevisi Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi terkait Aset sebagai Pedoman Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah mengikuti dinamika perkembangan regulasi mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan dan menindaklanjuti rekomendasi BPK-RI terhadap Sistem Pengendalian Intern.

❖ Bukti Dukung dari Capaian Indikator

Neraca Aset Kabupaten per 31 Desember 2024 yang telah melakukan penginputan data aset dan telah di verifikasi *(approved)*.

***2. Perbandingan antara capaian kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan beberapa tahun terakhir.***

**a)** Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah

**1.** Perbandingan capaian indikator kinerja Tahun 2024 dengan capaian indikator kinerja Tahun 2023 dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

| Indikator Kinerja | | Satuan | Capaian 2023 (%) | Capaian 2024 (%) | % Rata-rata capaian | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase SKPD yang penganggarannya menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) | Persentase | 100% | 100% | 100% | |
| 2 | Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai SAP | Persentase | 100% | 100% | 100% | |
| 3 | Persentase Pencairan Dana On Schedule | Persentase | 100% | 100% | 100% | |

**b)** Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah yang akuntabel

**1.** Perbandingan capaian indikator kinerja Tahun 2022 dengan capaian indikator kinerja Tahun 2021 dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

| Indikator Kinerja | | Satuan | Capaian 2023 (%) | Capaian 2024 (%) | % Rata-rata capaian | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase Data Aset Yang Akurat | Persentase | 100 % | 100 % | 100% | |

**c)** Sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Bidang urusan Keuangan

1. Perbandingan capaian indikator kinerja Tahun 2024 dengan capaian indikator kinerja Tahun 2023 dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat dari tabel dibawah ini

| Indikator Kinerja | | Satuan | Capaian 2023 (%) | Capaian 2024 (%) | % Rata-rata capaian | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase Pemenuhan layanan Keuangan dan administrasi Perkantoran | Persentase | 100% | 100% | 100% | |
| 2 | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi baik | Persentase | 100% | 100% | 100% | |
| 3 | Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu | Persentase | 100% | 100% | 100% | |
| 4 | Persentase Laporan capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel | Persentase | 100% | 100% | 100% | |

3. ***Perbandingan antara capaian Realisasi kinerja Tahun Lalu dengan Tahun ini dan beberapa tahun.***

Perbandingan capaian Realisasi kinerja Tahun 2023 dengan capaian Realisasi kinerja Tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

a) **Sasaran Indikator Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah**

| Indikator Kinerja | | Satuan | Realisasi | | Naik (Turun) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2023 | | |
| 1 | Persentase SKPD yang penganggarannya menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) | Persentase | 100% | 100% | Tetap | |
| 2 | Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai SAP | Persentase | 100% | 100% | Tetap | |
| 3 | Persentase Pencairan Dana On Schedule | Persentase | 100% | 100% | Tetap | |

**b) Sasaran Indikator Sasaran kualitas pengelolaan aset daerah yang akuntabel**

| Indikator Kinerja | | Satuan | Realisasi | | Naik (Turun) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2023 | | |
| 1 | Persentase Data Aset Yang Akurat | Persentase | 100% | 99,20% | Naik | |

***4. Perbandingan capaian Realisasi kinerja Tahun 2024 dengan target dalam Rencana Strategis BPKAD Tahun 2023-2026.***

Apabila dilihat dari perbandingan capaian Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut :

**a) Sasaran Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

| Indikator Kinerja | | Satuan | Realisasi 2023 | Realisasi s/d 2024 | Target 2024 | Capaian % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase SKPD yang penganggarannya menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) | Persentase | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2 | Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai SAP | Persentase | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 3 | Persentase Pencairan Dana On Schedule | Persentase | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

**1. Capaian Indikator Persentase OPD Yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa data realisasi persentase OPD yang menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) tahun 2024 dan tahun 2023 dengan tingkat pencapaian yang sama yaitu 100%. Pada tahun 2024 target yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya suatu hambatan yang berarti. Demikian pula pada tahun 2024 secara umum semua OPD telah

melaksanakan penganggaran berbasis kinerja. Program dan kegiatan yang telah dianggarkan dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang ditetapkan.

**2. Capaian Indikator Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai SAP**

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Perbandingan Realisasi persentase laporan keuangan OPD sesuai SAP Tahun 2023 dan Tahun 2024 realisasi indikator sama yaitu 100%. untuk melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP dan target yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya suatu hambatan ini terbukti dengan telah selesainya 51 OPD menyelesaikan Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP.

**3. Capaian Indikator Persentase Pencairan Dana On Schedule**

Perbandingan capaian realisasi Indikator Persentase Pencairan Dana On Schedule tahun 2023 dan tahun 2024 tetap sama yaitu dari target 100% capaian realiasasi 100 % Capaian indikator untuk melaksanakan Pencairan Dana On Schedule dan target yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya suatu hambatan ini terbukti dengan telah selesainya 51 OPD menyelesaikan semua proses Pembayaran sesuai dengan Schedule yang tepat waktu.

**b) Sasaran Indikator Sasaran kualitas pengelolaan aset daerah yang akuntabel**

| Indikator Kinerja | | Satuan | Realisasi 2023 | Realisasi s/d 2024 | Target 2024 | Capaian % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase Data Aset Yang Akurat | Persentase | 100 % | 100 % | 100% | 100% |

Realisasi capaian indikator Persentase Data Aset yang Akurat Tahun 2022 yaitu 99,20% sedangkan Tahun 2023 100 % mengalami kenaikan hal tersebut dikarnakan Laporan Hasil Reviu Tata Kelola Barang Milik Daerah Tahun 2022 Nomor 700/1371/LHR-BMD/ITDA/2022 Tanggal 01 Desember 2022 bahwa aset yang belum akurat sebanyak 386 persil sebesar Rp. 111.637.093.011,18,- atau 0,80%. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Bidang

Pengelolaan Aset Daerah BPKAD terus melakukan penelusuran melalui inventarisasi dan pemeriksaan fisik dilapangan bersama OPD terkait serta pihak BPN Kabupaten Musi Banyuasin.

### 5. *Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya*

Dari Tabel 3.3 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2024, pencapaian sasaran jika dibandingkan dengan realisasi keuangan menunjukkan efisiensi sumber daya keuangan.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan Program/Kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%$$

Pada tahun 2024 Realisasi biaya untuk semua program/Kegiatan dan sub kegiatan adalah : Rp. 509.012.950.853,00 sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp. 564.043.505.932,00 dengan ru mus efisiensi diatas diperoleh persentase efisensi biaya pada level program sebesar 100% - 90,24%=9,76%.

Persentase efisensi ini secara teori masih sangat kecil sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2024 secara umum tidak terdapat efisensi yang sangat signifikan dari penggunaan sumber daya biaya.

**Tabel 3.3**
**Akuntabilitas Keuangan**

| NO | SASARAN | | INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah | 1.1 | Persentase OPD Yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) | | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | 112.231.930,00 | 93.330.295,00 | 83,16% |
| | | | | | | | 2 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 76.202.330,00 | 68.025.636,00 | 89,27% |
| | | | | | | | 3 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | 33.640.000,00 | 17.000.000,00 | 50,54% |
| | | | | | | | 4 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | 17.500.000,00 | 17.000.000,00 | 97,14% |
| | | | | | | | 5 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | | 6 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | 5.600.000,00 | 4.300.000,00 | 76,79% |
| | | | | | | | 7 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 299.534.200,00 | 260.944.407,00 | 87,12% |
| | | | | | | | 8 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 299.075.000,00 | 278.768.262,00 | 93,21% |
| | | | | | | | 9 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 137.023.000,00 | 102.591.305,00 | 74,87% |
| | | | | | | | **Jumlah** | **1.010.806.460,00** | **841.959.905,00** | **83,30%** |
| | | 1.2 | Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai SAP | | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | 1 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah | 124.643.220 | 56.500.000 | 45,33% |
| | | | | | | | 2 Rekonsiliasi Dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-lo Dan Beban | 56.815.900 | 34.020.305 | 59,88% |
| | | | | | | | 3 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd Bulanan, Triwulanan Dan Semesteran | 359.999.700 | 226.001.962 | 62,78% |
| | | | | | | | 4 Konsolidasi Laporan Keuangan Skpd, Blud Dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 300.000.000 | 298.397.019 | 99,47% |
| | | | | | | | 5 Koordinasi Dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd Kabupaten/kota Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd Kabupaten/kota | 275.824.400 | 191.303.464 | 69,36% |
| | | | | | | | 6 Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Kerugian Daerah | 216.971.600 | 87.166.900 | 40,17% |
| | | | | | | | 7 Penyusunan Kebijakan Dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | 171.503.500 | 56.208.749 | 32,77% |
| | | | | | | | 8 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/kota | 156.515.105 | 105.136.465 | 67,17% |
| | | | | | | | 9 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Blud Kabupaten/kota | 271.114.563 | 68.540.588 | 25,28% |
| | | | | | | | **Jumlah** | **1.933.387.988** | **1.123.275.452** | **58,10%** |
| | | | | | | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | 1 Implementasi Dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | 220.449.194,00 | 84.684.906,00 | 38,41% |
| | | | | | | | 2 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/kota | 249.999.372,00 | 227.876.918,00 | 91,15% |
| | | | | | | | **Jumlah** | **470.448.566,00** | **312.561.824,00** | **66,44%** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah yang akuntabel | 1.2 | Persentase Data Aset yang Akurat | | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Pengelolaan Barang Milik Daerah | 1 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 209.211.800 | 148.735.141 | 71,09% |
| | | | | | | | 2 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | 262.304.885 | 221.026.064,00 | 84,26% |
| | | | | | | | 3 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | 118.564.000 | 63.586.095,00 | 53,63% |
| | | | | | | | 4 | Pengamanan Barang Milik Daerah | 188.289.900 | 102.142.334,00 | 54,25% |
| | | | | | | | 5 | Penilaian Barang Milik Daerah | 84.000.100 | 50.375.680,00 | 59,97% |
| | | | | | | | 6 | Pengawasan Dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | 84.999.800 | 76.026.231,00 | 89,44% |
| | | | | | | | 7 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 254.959.900 | 212.294.400,00 | 83,27% |
| | | | | | | | 8 | Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 50.229.900 | 38.351.100,00 | 76,35% |
| | | | | | | | 9 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 218.865.800 | 145.621.509,00 | 66,53% |
| | | | | | | | 10 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/kota | 65.322.325 | 17.918.000,00 | 27,43% |
| | | | | | | | | **Jumlah** | **1.536.748.410,00** | **1.076.076.554,00** | **70,02%** |
| 3 | Terwujudnya peningkatan kapasitas kinerja aparatur | | Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu | | Program Penunjang urursan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 1 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 98.868.380 | 95.900.000 | 97,00% |
| | | | | | | | 2 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 104.152.000 | 42.845.000 | 41,14% |
| | Terwujudnya kelancaran administrasi kantor | | Persentase Pemenuhan layanan Administrasi | | Program Penunjang urursan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor | 79.141.272 | 74.016.200 | 93,52% |
| | | | | | | | 2 | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | 644.650.182 | 618.504.780 | 95,94% |
| | | | | | | | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 93.067.827 | 84.093.964 | 90,36% |
| | | | | | | | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 477.280.560 | 441.093.273 | 92,42% |
| | | | | | | | 5 | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | 175.268.780 | 146.623.650 | 83,66% |
| | | | | | | | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan | 49.680.000 | 46.946.000 | 94,50% |
| | | | | | | | 7 | Penyediaan Bahan/material | 50.630.000 | - | 0,00% |
| | | | | | | | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 92.660.000 | 53.871.150 | 58,14% |
| | | | | | | | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd | 449.546.000 | 392.012.833 | 87,20% |
| | | | | | | | 10 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Skpd | 20.000.000 | - | 0,00% |
| | | | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1 | Pengadaan Mebel | 238.700.240 | 215.171.600 | 90,14% |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 854.335.110 | 725.434.172,00 | 84,91% |
| | | | | | | | 2 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.129.778.400 | 1.090.863.200,00 | 96,56% |
| | | | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik | | Program Penunjang urursan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 1 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 134.668.000 | 120.585.721 | 89,54% |
| | | | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 41.050.000 | 27.168.502 | 66,18% |
| | | | | | | | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 365.920.000 | 248.891.478 | 68,02% |
| | | | | | | | 3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 225.600.410 | 213.142.140 | 94,48% |
| | | | | | | | 4 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 63.019.960 | 56.703.779 | 89,98% |
| | | | Persentase Laporan capaian Kinerja dan Laporan Keuangan yang dilakukan sangat tepat | | Program Penunjang urursan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 43.819.612 | 42.965.200 | 98,05% |
| | | | | | | | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 29.839.539 | 28.996.900 | 97,18% |
| | | | | | | | 3 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 12.854.918.799 | 10.720.204.273 | 83,39% |
| | | | | | | | | **Jumlah** | **18.316.595.071,00** | **15.486.033.815,00** | **84,55%** |
| | | | | | | | | **Jumlah Total** | **564.043.505.932,00** | **509.012.950.853,00** | **90,24%** |

### 6. *Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan kinerja*

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program /Kegiatan dan sub yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis adalah 3 program dan 6 kegiatan 56 sub kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

   Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 545.726.910.861,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 493.526.917.038,00 atau 90,49%.

   Program ini mendukung 2 sasaran strategis BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin dengan 3 Indikator Kinerja.

   ☞ Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah

   a. Indikator Persentase OPD yang menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)

      Didukung oleh 1 kegiatan dan 9 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.010.806.460,00 Realisasi sebesar Rp 841.959.905,00 atau 83,30%

   b. Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai SAP Didukung oleh 2 kegiatan dan 11 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.403.836.554,00 Realisasi sebesar Rp 1.435.837.276,00 atau 59,73%

   c. Persentase Pencairan Dana On Scehedule

      Didukung oleh 2 kegiatan dan 6 Sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 540.775.519.437,00 Realisasi sebesar Rp 490.173.043.303,00 atau 90,64%

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

☞ Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah yang akuntabel

a. Persentase Data Aset Yang Akurat

Didukung oleh 1 kegiatan dan 10 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.536.748.410,00 Realisasi sebesar 1.076076.554,00 atau 70.02%

3. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Untuk mewujudkan program ini di dukung oleh 6 Kegiatan dan 23 Sub kegiatan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 18.316.595.071,00 dan realisasinya sebesar Rp. 15.486.033.815,00atau 84,55%

## B. Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Belanja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp. 564.043.505.932,00 terdiri Belanja Operasi Rp. 23.102.620.131,00 realisasi sebesar Rp. 18.405.075.289,00 atau 90,79% dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 5.435.810.272,00 dengan realiasi anggaran sebesar Rp. 2.155.951.800,00 atau 39,66% dan Belanja Transfer Rp. 535.036.873.065,00 realiasasi sebesar Rp. 487.822.595.484,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Operasi terdiri dari:
  a. Belanja Pegawai anggaran sebesar Rp. 12.854.918.799,00 dan Realisasi sebesar Rp. 10.720.204.273,00 atau 83,39%
  b. Belanja Barang dan Jasa anggaran sebesar Rp. 5.461.676.272,00 dan Realisasi sebesar Rp. 4.765.829.542,00 atau 87,26%
- Belanja Tidak Terduga terdiri dari :
  a. Belanja Belanja Tidak Terduga anggaran sebesar Rp. 5.435.810.272,00 dan Realisasi sebesar Rp. 2.155.951.800,00 atau 39,66%
- Belanja Transfer terdiri dari :
  a. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp. 535.036.873.065,00 dan Realisasi Rp. 487.822.595.484,00 atau 91,18% dan tabel anggaran dan realisasi secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

# Tabel
# Anggaran dan Realisasi Tahun 2024
# Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN 2024 | REALISASI 2024 | % 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4 / 3) * 100 |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | **23.957.163.395,00** | **19.222.145.849,00** | **80,24** |
| **5,1** | **BELANJA OPERASI** | **23.102.620.131,00** | **18.405.075.289,00** | **79,67** |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 12.884.158.799,00 | 10.739.924.273,00 | 83,36 |
| 5.1.01.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 5.124.668.799,00 | 4.664.344.482,00 | 91,02 |
| 5.1.01.01.01 | Belanja Gaji Pokok ASN | 3.884.391.276,00 | 3.599.340.812,00 | 92,66 |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | 3.884.391.276,00 | 3.599.340.812,00 | 92,66 |
| 5.1.01.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | 398.970.970,00 | 351.984.032,00 | 88,22 |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 398.970.970,00 | 351.984.032,00 | 88,22 |
| 5.1.01.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | 166.849.996,00 | 148.505.000,00 | 89,01 |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 166.849.996,00 | 148.505.000,00 | 89,01 |
| 5.1.01.01.04 | Belanja Tunjangan Fungsional ASN | 80.679.990,00 | 64.220.000,00 | 79,60 |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 80.679.990,00 | 64.220.000,00 | 79,60 |
| 5.1.01.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | 148.290.000,00 | 123.655.000,00 | 83,39 |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 148.290.000,00 | 123.655.000,00 | 83,39 |
| 5.1.01.01.06 | Belanja Tunjangan Beras ASN | 228.123.000,00 | 197.272.080,00 | 86,48 |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | 228.123.000,00 | 197.272.080,00 | 86,48 |
| 5.1.01.01.07 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | 24.863.736,00 | 5.225.609,00 | 21,02 |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 24.863.736,00 | 5.225.609,00 | 21,02 |
| 5.1.01.01.08 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | 322.214,00 | 49.031,00 | 15,22 |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 322.214,00 | 49.031,00 | 15,22 |
| 5.1.01.01.09 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN | 155.746.272,00 | 144.911.714,00 | 93,04 |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 155.746.272,00 | 144.911.714,00 | 93,04 |
| 5.1.01.01.10 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | 7.973.664,00 | 7.295.250,00 | 91,49 |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 7.973.664,00 | 7.295.250,00 | 91,49 |
| 5.1.01.01.11 | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN | 23.592.540,00 | 21.885.954,00 | 92,77 |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 23.592.540,00 | 21.885.954,00 | 92,77 |
| 5.1.01.01.12 | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN | 4.865.141,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.01.01.12.0001 | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS | 4.865.141,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 7.730.250.000,00 | 6.055.859.791,00 | 78,34 |
| 5.1.01.02.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | 7.730.250.000,00 | 6.055.859.791,00 | 78,34 |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 7.730.250.000,00 | 6.055.859.791,00 | 78,34 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 29.240.000,00 | 19.720.000,00 | 67,44 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | 29.240.000,00 | 19.720.000,00 | 67,44 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 29.240.000,00 | 19.720.000,00 | 67,44 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.218.461.332,00 | 7.665.151.016,00 | 75,01 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | 2.445.464.652,00 | 1.748.082.216,00 | 71,48 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 2.445.464.652,00 | 1.748.082.216,00 | 71,48 |
| 5.1.02.01.01.0002 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 15.264.400,00 | 14.978.779,00 | 98,13 |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 62.876.882,00 | 55.793.630,00 | 88,73 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 514.606.292,05 | 438.373.273,00 | 85,19 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.086.528.621,95 | 746.993.450,00 | 68,75 |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 6.598.120,00 | 6.569.440,00 | 99,57 |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 77.781.272,00 | 72.656.200,00 | 93,41 |
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | 39.673.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainny | 22.222.264,00 | 20.370.894,00 | 91,67 |
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 41.580.000,00 | 27.114.000,00 | 65,21 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 289.361.800,00 | 134.883.400,00 | 46,61 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 122.268.000,00 | 75.194.150,00 | 61,50 |
| 5.1.02.01.01.0063 | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | 59.893.380,00 | 56.925.000,00 | 95,04 |
| 5.1.02.01.01.0064 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | 67.315.000,00 | 59.935.000,00 | 89,04 |
| 5.1.02.01.01.0065 | Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0074 | Belanja Pakaian Adat Daerah | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga | 38.295.000,00 | 38.295.000,00 | 100,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | 4.047.056.080,00 | 3.165.088.837,00 | 78,21 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | 3.582.389.110,00 | 2.781.926.147,00 | 77,66 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 774.980.000,00 | 445.250.000,00 | 57,45 |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 200.900.000,00 | 97.000.000,00 | 48,28 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 145.600.000,00 | 144.487.400,00 | 99,24 |
| 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 663.000.000,00 | 649.890.600,00 | 98,02 |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 154.700.000,00 | 154.671.200,00 | 99,98 |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 88.400.000,00 | 86.654.000,00 | 98,02 |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 44.200.000,00 | 22.100.000,00 | 50,00 |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0053 | Belanja Jasa Pengukuran Tanah | 1.950.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 100,00 |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon | 19.200.000,00 | 2.353.918,00 | 12,26 |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air | 12.996.000,00 | 11.538.000,00 | 88,78 |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | 412.564.410,00 | 349.257.993,00 | 84,66 |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 49.000.000,00 | 44.770.000,00 | 91,37 |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 408.890.700,00 | 362.284.261,00 | 88,60 |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 30.000.000,00 | 18.885.775,00 | 62,95 |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 524.008.000,00 | 380.783.000,00 | 72,67 |
| 5.1.02.02.02 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | 118.574.400,00 | 109.216.990,00 | 92,11 |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | 9.878.400,00 | 9.660.000,00 | 97,79 |
| 5.1.02.02.02.0008 | Belanja Asuransi Barang Milik Daerah | 108.696.000,00 | 99.556.990,00 | 91,59 |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 142.052.000,00 | 124.640.000,00 | 87,74 |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 139.052.000,00 | 124.640.000,00 | 89,64 |
| 5.1.02.02.05.0036 | Belanja Sewa Taman | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.08 | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi | 28.040.570,00 | 27.605.700,00 | 98,45 |
| 5.1.02.02.08.0003 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.08.0004 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior | 18.001.980,00 | 17.754.450,00 | 98,62 |
| 5.1.02.02.08.0018 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur | 10.038.590,00 | 9.851.250,00 | 98,13 |
| 5.1.02.02.09 | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi | 120.000.000,00 | 100.000.000,00 | 83,33 |
| 5.1.02.02.09.0003 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika | 120.000.000,00 | 100.000.000,00 | 83,33 |
| 5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatiha | 56.000.000,00 | 21.700.000,00 | 38,75 |
| 5.1.02.02.12.0001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 56.000.000,00 | 21.700.000,00 | 38,75 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | 619.565.400,00 | 472.122.645,00 | 76,20 |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 424.045.560,00 | 288.626.205,00 | 68,06 |
| 5.1.02.03.02.0022 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set | 7.190.000,00 | 4.030.000,00 | 56,05 |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermo | 376.970.000,00 | 246.901.205,00 | 65,50 |
| 5.1.02.03.02.0115 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Pe | 5.715.560,00 | 4.975.000,00 | 87,04 |
| 5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainny | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendin | 28.670.000,00 | 27.770.000,00 | 96,86 |
| 5.1.02.03.02.0124 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemad | 5.500.000,00 | 4.950.000,00 | 90,00 |
| 5.1.02.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 195.519.840,00 | 183.496.440,00 | 93,85 |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan | 195.519.840,00 | 183.496.440,00 | 93,85 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | 3.106.375.200,00 | 2.279.857.318,00 | 73,39 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 3.106.375.200,00 | 2.279.857.318,00 | 73,39 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 2.879.285.200,00 | 2.122.640.745,00 | 73,72 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 227.090.000,00 | 157.216.573,00 | 69,23 |
| 5.1.03 | Belanja Bunga | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.03.03 | Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.03.03.01 | Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.03.03.01.0001 | Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **JUMLAH BELANJA OPERASI** | **23.102.620.131,00** | **18.405.075.289,00** | **79,67** |
| | | | | |
| **5,2** | **BELANJA MODAL** | **854.543.264,00** | **817.070.560,00** | **95,61** |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 854.543.264,00 | 817.070.560,00 | 95,61 |
| 5.2.02.01 | Belanja Modal Alat Besar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.02.01.03 | Belanja Modal Alat Bantu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.02.01.03.0005 | Belanja Modal Pompa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.02.04 | Belanja Modal Alat Pertanian | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 100,00 |
| 5.2.02.04.01 | Belanja Modal Alat Pengolahan | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 100,00 |
| 5.2.02.04.01.0008 | Belanja Modal Alat Produksi Perikanan | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 100,00 |
| 5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | 328.657.740,00 | 313.756.500,00 | 95,47 |
| 5.2.02.05.01 | Belanja Modal Alat Kantor | 28.714.000,00 | 26.980.000,00 | 93,96 |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | 28.714.000,00 | 26.980.000,00 | 93,96 |
| 5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | 252.783.500,00 | 247.562.500,00 | 97,93 |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel | 199.846.000,00 | 194.625.000,00 | 97,39 |
| 5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin | 3.737.500,00 | 3.737.500,00 | 100,00 |
| 5.2.02.05.02.0005 | Belanja Modal Alat Dapur | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 49.200.000,00 | 49.200.000,00 | 100,00 |
| 5.2.02.05.03 | Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 47.160.240,00 | 39.214.000,00 | 83,15 |
| 5.2.02.05.03.0001 | Belanja Modal Meja Kerja Pejabat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.02.05.03.0003 | Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.02.05.03.0004 | Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.02.05.03.0007 | Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat | 47.160.240,00 | 39.214.000,00 | 83,15 |
| 5.2.02.06 | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | 146.130.275,00 | 135.024.260,00 | 92,40 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.2.02.06.01 | Belanja Modal Alat Studio | 130.530.275,00 | 120.084.260,00 | 92,00 |
| 5.2.02.06.01.0001 | Belanja Modal Peralatan Studio Audio | 49.619.179,00 | 47.070.000,00 | 94,86 |
| 5.2.02.06.01.0002 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | 80.911.096,00 | 73.014.260,00 | 90,24 |
| 5.2.02.06.02 | Belanja Modal Alat Komunikasi | 15.600.000,00 | 14.940.000,00 | 95,77 |
| 5.2.02.06.02.0001 | Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.02.06.02.0005 | Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF | 15.600.000,00 | 14.940.000,00 | 95,77 |
| 5.2.02.10 | Belanja Modal Komputer | 376.755.249,00 | 365.289.800,00 | 96,96 |
| 5.2.02.10.01 | Belanja Modal Komputer Unit | 341.610.554,00 | 339.453.650,00 | 99,37 |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer | 204.227.257,00 | 202.137.200,00 | 98,98 |
| 5.2.02.10.01.0003 | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya | 137.383.297,00 | 137.316.450,00 | 99,95 |
| 5.2.02.10.02 | Belanja Modal Peralatan Komputer | 35.144.695,00 | 25.836.150,00 | 73,51 |
| 5.2.02.10.02.0004 | Belanja Modal Peralatan Jaringan | 29.781.295,00 | 22.556.150,00 | 75,74 |
| 5.2.02.10.02.0005 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | 5.363.400,00 | 3.280.000,00 | 61,16 |
| | **JUMLAH BELANJA MODAL** | **854.543.264,00** | **817.070.560,00** | **95,61** |
| | | | | |
| | **JUMLAH BELANJA** | **23.957.163.395,00** | **19.222.145.849,00** | **80,24** |
| | | | | |
| | **SURPLUS/DEFISIT** | **126.089.550.605,00** | **123.303.306.551,00** | **97,79** |
| | | | | |
| 5.4.02.05.01.0002 | Belanja Bantuan Keuangan Umum Provinsi kepada Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.02.05.01.0002 | Belanja Bantuan Keuangan Umum Provinsi kepada Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 8 (delapan) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah tidak mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 564.043.505.932 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 509.012.950.853.

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 2023-2026 menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 8 (delapan) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 1 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2024, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 100 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100 %
- Sasaran 3 terdiri dari 4 indikator dengan nilai 100 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 508.737.267.865,00 (Lima Ratus Delapan Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah 100 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukan bahwa perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Musi Banyuasin.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Musi Banyuasin.

# RENCANA STRATEGIK
# Tahun 2023- 2026

**Instansi** : **Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Musi Banyuasin**

**Visi** : **-**

**Misi** :

| No. | Tujuan | | Sasaran | | | | | | | | | | | Kebijakan | | Program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | | Indikator Kinerja | | Satuan | Transis | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | | |
| 1. | 1.1 | Meningkatnya akuntabilitaskinerja keuangan daerah | 1.1.1 | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah | 1.1.1.1 | Persentase SKPD yang penganggarannya menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) | % | 100% | 100% | 100% | - | - | | 1.1.1.1.1 | Peningkatan koordinasi OPD dan TAPD dalam rangka penyusunan Anggaran yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan peningkatan kualitas SDM | 1 Program Pengelolaan Keuangan Daerah |
| | | | | | 1.1.1.2 | Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai SAP | % | 100% | 100% | 100% | - | - | | 1.1.1.1.2 | Peningkatan koordinasi dengan PD dalam rangka penyusunan Laporan keuangan yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan peningkatan kualitas SDM | |
| | | | | | 1.1.1.3 | Persentase Pencairan Dana On Schedule | % | 100% | 100% | 100% | - | - | | 1.1.1.1.3 | Peningkatan koordinasi PD dalam rangka penatausahaan keuangan daerah yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan peningkatan kualitas SDM | |
| | | | 1.1.2 | Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah yang akuntabel | 1.1.1.1 | Persentase Data Aset Yang Akurat | % | 99,20% | 100% | 100% | - | - | | 1.1.1.1.1 | Peningkatan kualitas penatausahaan aset daerah yang akurat | |

| No. | Tujuan | | Sasaran | | | | | | | | | | | Kebijakan | | Program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | | Indikator Kinerja | | Satuan | Transis | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | | |
| | | Terwujudnya aparatur yang berkualitas | 2.1.1 | Terwujudnya peningkatan kapasitas kinerja aparatur | 2.1.1.1 | Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran | % | 100% | 100% | 100% | - | - | | 2.1.1.1.1 | Melakukan pengawasan secara berjenjang dan mengikutsertakan kegiatan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan formal | 2 Program Penunjang urursan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
| | | | 2.1.2 | Terwujudnya kelancaran administrasi kantor | 2.1.1.2 | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur | % | 100% | 100% | 100% | - | - | | 2.1.1.1.2 | penyediaan sarana dan prasarana aparatur | |

*Lampiran RKT*

**RENCANA KINERJA TAHUNAN**
**TAHUN 2024**

**Kabupaten : Musi Banyuasin**

**Nama SKPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

| Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja | | Target |
|---|---|---|---|---|
| (1) | | (2) | | (3) |
| 1.1.1 | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah | 1.1.1.1 | Persentase SKPD yang penganggarannya menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) | 100 % |
| | | 1.1.2.1 | Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai SAP | 100 % |
| | | 1.1.3.1 | Persentase Pencairan Dana On Scehedule | 100 % |
| 1.1.2 | Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah yang akuntabel | 1.1.1.1 | Persentase Data Aset Yang Akurat | 100 % |

**PENGUKURAN KINERJA**
**TAHUN 2024**

**Kabupaten : Musi Banyuasin**
**Nama SKPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

| Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja | | | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | | (2) | | | (3) | (4) | (5) |
| 1.1.1 | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah | 1.1.1.1 | Persentase SKPD yang penganggarannya menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) | % | 100% | 100% | 100% |
| | | 1.1.1.2 | Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai SAP | % | 100% | 100% | 100% |
| | | 1.1.1.3 | Persentase Pencairan Dana On Scehedule | % | 100% | 100% | 100% |
| 1.1.2 | Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah yang akuntabel | 1.1.1.1 | Persentase Data Aset Yang Akurat | % | 100% | 100% | 100% |

**Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2024** : Rp. 564.043.505.932,00

**Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2024** : Rp 508.737.267.865,00